



News-Letter

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 05/NL/05/2015

Mei 2015



Presiden Jadikan Pulau Buru Sebagai Lumbung Padi Maluku

**Pemerintah Terapkan Pertanian Modern
Untuk Jadikan Merauke Lumbung Pangan**

**Antisipasi Dampak El Nino Pada Stok Pangan
Pemerintah Berencana Tingkatkan Anggaran Pertanian**



Presiden Jadikan Pulau Buru Sebagai Lumbung Padi maluku	03
Pemerintah Terapkan Pertanian Modern Untuk Jadikan Merauke Lumbung Pangan	04
Antisipasi Dampak El Nino Pada Stok Pangan Pemerintah Berencana Tingkatkan Anggaran Pertanian	06
Pentingnya Peran Profesor Riset dan Ahli Dalam Mencapai Swasembada Pangan	07
Kementan Dorong 100 Kabupaten di Indonesia Untuk Tingkatkan Produksi Jagung Nasional	08
Walau Belum Swasembada Pangan Kementan Pastikan Stok Beras Aman	09
Komitmen Kerja Sama Spesifik di Bidang Pertanian	10
Mentan: "Bantu Tingkatkan Produksi Pangan Mahasiswa Agar Turun ke Sawah"	11
Mentan: "Harga Beras Rendah dari HPP Bukti Stok Beras Melimpah"	13
Komoditas Unggulan Daerah dan Antisipasi El Nino	14

Pengarah
Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Penanggung Jawab
Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

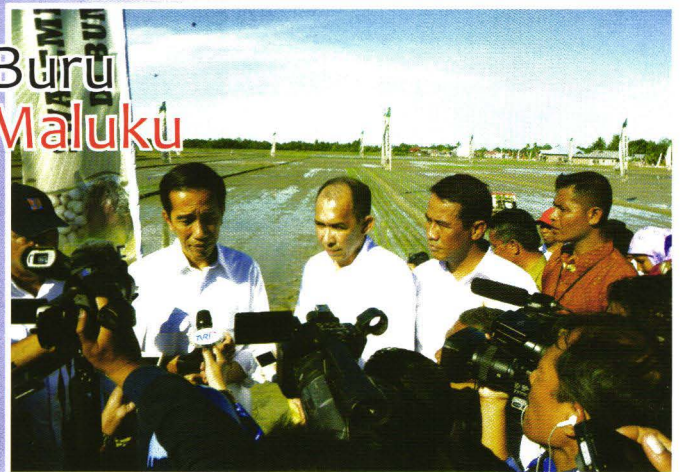
Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom
Kurniawatisari, S.Sos

Distribusi
Makmur

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian

Presiden Jadikan Pulau Buru Sebagai Lumbung Padi Maluku

"Pulau Buru memiliki potensi sawah yang sangat besar yakni mencapai 10 ribu ha, akan tetapi baru separuh dari luas lahan tersebut baru digarap oleh petani. Apabila potensi sawah tersebut bisa digarap dengan baik maka produksi beras bisa melimpah. Dengan adanya produksi pangan melimpah, Pulau Buru dapat sebagai daerah penyumbang pasokan beras dengan menjadi lumbung padi"



Di antara beberapa daerah di Provinsi Maluku, Pulau Buru memiliki potensi sawah yang sangat besar, Pemerintah ber tekad untuk menjadikan Kabupaten Buru sebagai penghasil beras terbesar di Maluku. Untuk itulah Pemerintah memberikan motivasi serta semangat yang besar bagi Pemda dan masyarakat setempat untuk meningkatkan swasembada beras di daerah tersebut melalui penanaman Penanaman Perdana 1 juta benih Padi dan Jagung oleh Presiden di Pulau Buru.

"Saya melihat sawah di sini merupakan sawah yang sangat subur, namun masih diperlukan penanganan yang intensif sehingga nantinya, berasnya merupakan produksi beras sendiri dari Pulau Buru Provinsi Maluku, bukan dari provinsi lain. Dengan adanya produksi pangan melimpah, Maluku tidak perlu lagi membeli beras dari Jawa. Semua kebutuhan pangan bisa ditutupi oleh produksi Pulau Buru" kata Presiden Joko Widodo saat usai penanaman perdana padi dan jagung di Desa Wanareja, Gelar Way Apo, Kabupaten Buru Maluku (7/5).

Jenis padi yang ditanam pada acara penanaman padi di pulau Buru adalah varietas Conde. Varietas padi tersebut umur panennya 110 hari dengan potensi optimal 6 sampai 8 ton per hektar dan varietas Conde



ini tahan terhadap penyakit busuk leher. Dalam proses penanaman para petani menanam padi baik secara manual maupun dengan menggunakan mesin tanam padi dan pada lahan yang siap di tanam telah dibuat garis pematang sawah untuk mengatur jarak tanam.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak mau bergantung terus soal impor beras pada Vietnam dan Thailand. Alasannya, Indonesia adalah negeri kaya dan makmur. Indonesia harus tanam sendiri sehingga tidak bergantung pada mereka. Salah satu cara untuk meningkatkan produkti beras, Pulau Buru harus dapat sebagai daerah penyumbang pasokan beras dengan menjadi lumbung padi bagi Provinsi Maluku.

"Dengan menjadi lumbung padi bagi Provinsi Maluku akan

terwujud ketahanan pangan daerah. Dengan begitu nantinya dari ketahanan pangan daerah dapat bergulir menjadi ketahanan pangan nasional. Sehingga, kita tidak perlu impor beras lagi. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan beras kita sendiri. Kita harus malu masa beras saja impor, jagung pun impor. Semuanya kok impor," tegas Presiden.

Dihadapan petani, Presiden menyebut Pulau Buru memiliki potensi sawah yang sangat besar yakni mencapai 10 ribu ha, akan tetapi baru separuh dari luas lahan tersebut baru digarap oleh petani. Apabila potensi sawah tersebut bisa digarap dengan baik maka produksi beras bisa melimpah. Untuk mencapai keinginan itu berbagai upaya akan dilakukan seperti membenahi sistem irigasi, memberi tambahan benih serta menyuplai pupuk bagi

petani.

"Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Menteri Pertanian agar dalam 2 tahun ke depan, lahan 10 ribu itu bisa digarap semuanya. Petani juga harus siap, saya perlu komitmen Bapak ibu petani semuanya, kalau ada masalah di lapangan segera sampaikan. Saya ingin Pulau Buru menjadi lumbung padi bagi Maluku, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sendiri, Maluku tidak perlu menerima distribusi beras dari provinsi lain," ujar Presiden.

Untuk mewujudkan Pulau Buru sebagai lumbung beras, Presiden memberikan bantuan benih padi dan jagung serta bantuan alat traktor kepada petani di Pulau Buru Maluku. Presiden berharap dengan adanya bantuan tersebut

produksi beras di Pulau Buru bisa meningkat sehingga bisa mengurangi ketergantungan suplai dari provinsi lain. Sedangkan bantuan benih jagung sebanyak 1.000 hektar ditambah 20 traktor diharapkan bisa meringankan pekerjaan petani.

"Kepada masyarakat Pulau Buru, Saya sudah berikan benih jagungnya untuk areal 1000 ha, traktornya 20 unit. Saya hanya menghimbau agar dalam tempo dalam dua tahun, kurang lebih dari 10.000 hektar sawah di Pulau Buru dapat dikembangkan. Kalau bagus produksi, kita lihat per hektarnya nantinya dapat menghasilkan berapa ton. Kalau di Jawa bisa produksi 9 ton jagung, sedang padi antara 8, 9, 10 ton.

Dengan sistem pengairan yang baik, cara penanaman yang baik, benihnya yang baik

maka Maluku juga bisa memproduksi padi dan jagung," ujar Presiden.

Terkait Bendungan Way Leman yang diresmikan, Presiden menjelaskan hal itu merupakan bagian dari usaha untuk mencapai target Pulau Buru sebagai lumbung beras Maluku. Sebenarnya Bendungan Way Leman dibangun pada tahun 1982-1983 untuk mengairi sawah seluas 935 ha dengan intensitas tanam 2 kali setahun dengan produktivitas 3-4 ton GKG/ha. Namun pada tahun 2010-2011 terjadi banjir besar yang merusak tubuh bendungan dan tebing Sungai Way Tina sehingga bendungan tidak dapat berfungsi penuh lagi.

Untuk itu, maka pada tahun 2012 hingga 2015 dibangun Bendungan Way Leman oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.

Setelah Bendung Way Leman selesai diharapkan bisa memperluas areal persawahan yang bisa diairi meningkat jadi 2500 ha dengan intensitas tanam 3 kali setahun dan produktivitas meningkat hingga menjadi 7 ton GKG/ha. Presiden berjanji akan kembali ke Pulau Buru untuk melihat perkembangan program pangan yang dicanangkan, bila perlu saat panen raya tiba dirinya diundang untuk hadir.

"Saya berjanji kembali dalam 2 tahun lagi, untuk melihat hasil pertanian Pulau Buru. Kalau tak ada masalah baik itu terkait saluran irigasinya, atau benih maupun pupuknya maka 2 tahun lagi kita akan ketemu lagi. Saya akan senang bila dalam waktu 2 tahun ke depan target tersebut sudah bisa dicapai. Saya akan kesini untuk buktikan bahwa kita memang punya masyarakat yang produktif." kata Presiden.

Pemerintah Terapkan Pertanian Modern Untuk Jadikan Merauke Lumbung Pangan

"Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan pertanian yang dapat menjadi lumbung padi dunia. Pertanian Merauke nantinya yang pertama memakai mesin modern. Dengan menerapkan pertanian modern pemerintah bisa menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, bahkan dunia"



juta hektar, termasuk 1,2 juta hektar untuk sawah padi.

"Saya telah mendapatkan laporan pada bulan lalu terkait potensi lahan pertanian di Merauke yang memiliki lahan datar seluas 4,6 juta hektare cocok dijadikan lahan pertanian. Dari 4,6 juta hektar, ada lahan sudah teridentifikasi seluas 1,2 juta hektar yang sudah siap untuk dioptimalisasi sebagai lahan sawah. Dari angka ini kita harapkan dalam 3 tahun sudah bisa selesai, rampung. Tetapi setiap tahun akan kita lihat progres-nya" kata Presiden Joko Widodo saat usai penen raya di Wapeko, Merauke Papua (10/5).

Berdasarkan laporan juga, Presiden menuturkan saat sekarang di Merauke ada lahan seluas 48 ribu hektare dikerjakan masyarakat dengan cara masih tradisional. Nantinya luas lahan tersebut akan dikerjakan secara modern.

Semuanya akan dikerjakan dengan mekanisasi, traktor besar, harvester besar sehingga diharapkan perhektar bisa dicapai produksi lebih dari 8 ton.

"Di Indonesia, Pertanian Merauke nantinya yang pertama memakai mesin modern, karena tidak mungkin bisa dikerjakan pakai tangan, harus pakai mesin modern mencakup juga metode panen menggunakan alat pemanen otomatis raksasa. Pengolahan modern yang diterapkan di lahan sawah 1,2 juta hektar itu membuat tiap hektarnya memberikan hasil panen hingga 8 ton." tutur Presiden.

Presiden mengungkapkan keinginan menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan berdasarkan hitungan di atas kertas. Dengan total lahan 4,6 juta hektar, maka dalam setahun atau 3 kali panen maka ada 60 juta ton padi

Dalam upaya mencapai swasembada pangan, Pemerintah ingin menjadikan Merauke di Papua, sebagai pusat pertanian pangan berbasis teknologi modern pertama di Indonesia. Dengan menerapkan pertanian modern, pemerintah bisa menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, bahkan dunia. Apalagi Kabupaten paling Timur Indonesia tersebut memiliki lahan datar yang berpotensi untuk pertanian seluas 4,6

yang bisa dihasilkan. Oleh karena itu Kabupaten Merauke yang memiliki potensi lahan pertanian seluas 4,6 juta hektare dapat menjadi lumbung padi dunia.

"Kalau 1,2 juta hektar saja dapat berhasil panen, dan nantinya 4,6 juta hektar juga panen berarti per tahun panennya bisa 3 kali, kalau dengan mekanisasi dan mesin modern bisa 3 kali. Kalau ini berhasil, maka Merauke bukan hanya jadi lumbungnya Indonesia, ketergantungan dunia kepada pangan akan ada di Merauke ini," ungkap Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa untuk mengembangkan lahan pertanian berbasis modern butuh dukungan investor. Selain itu juga butuh dukungan masyarakat selaku pemilik lahan, termasuk soal skema bagi hasil dengan investor. Pemerintah akan memberi dukungan kepada BUMN dan swasta untuk berinvestasi bidang pertanian di Merauke, terutama untuk riset mengembangkan bibit unggulan yang sesuai dan fasilitas pendidikan pertanian modern.

"Kondisi lahan di Merauke bisa dijadikan sebagai contoh kerjasama yang bisa dilakukan antara petani, pengusaha, termasuk investor seperti BUMN. Pemerintah akan segera memperbaiki saluran irigasi seluas 7.000 hektar agar produktivitas padi naik. Sistem irigasi, jalan dan pelabuhan dibangun tahun ini juga. Sehingga mengirim beras ke mana-mana akan lebih mudah. Jika berhasil, ketergantungan dunia terhadap pangan, akan ada di sini," jelas Presiden.

Menanggapi target Presiden menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Dunia, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyatakan pihaknya siap untuk mendukung terwujudnya target tersebut, mengingat semua kondisi yang ada di Merauke juga sangat mendukung. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya telah melakukan Pencanangan Nasional 1.000 Desa Mandiri Benih. Pencanangan tersebut untuk menyelesaikan salah satu permasalahan utama pertanian, yakni kurangnya ketersediaan dan rendahnya kualitas benih padi yang menyebabkan produksi padi petani stagnan bahkan menurun.

"Sesuai arahan Presiden, Papua akan dijadikan daerah lumbung pangan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, di Merauke akan dibangun lahan sawah sebesar 1,2 juta hektar selama 3 tahun ke depan oleh pihak swasta dan BUMN. Tahun ini akan diselesaikan pembukaan sawah baru di Merauke seluas 5.000 hektar, sedangkan 1.000 hektar sawah baru di antaranya telah berhasil dicetak dan 261 hektar berhasil ditanam serta hasilnya sudah mulai dipanen. Kami berusaha lebih cepat untuk daulat benih, sebab benih itu penting untuk menaikkan produksi padi. Sebagai contoh benih baru Inpari 13 produksinya 7,1 ton per hektar dari benih sebelumnya hanya mampu produksi 4 ton per hektar," jelas Mentan.

Mentan menuturkan pemerintah akan bekerja sama dengan kalangan usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat pemilik hak ulayat. Dengan

menggandeng beberapa pihak tersebut, maka beban itu akan dipikul antara pemerintah atau BUMN dalam hal ini BP Pangan dan pihak swasta yang masing-masing 250 ribu hektare (ha) per tahun, selama dua tahun berarti satu juta ha.

Mengingat Merauke juga memerlukan sokongan penuh baik itu benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan), maka selain melakukan pencanangan, Mentan juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) pada 10 kelompok tani yang ada di desa tersebut. Adapun total bantuan alsintan di Provinsi Papua sebesar 211 unit, sementara Kabupaten Merauke mendapat jatah sebanyak 50 unit, serta tambahan sebanyak 50 unit.

Mentan juga memaparkan yang menjadi kendala utama di Merauke adalah mobilisasi alat-alat pertanian yang membutuhkan biaya besar, sehingga untuk ini pemerintah wajib turun tangan langsung. Namun, melibatkan kalangan pengusaha, pemerintah memastikan akan tetap bisa menjaga asas keadilan bagi para petani rakyat meski walaupun perusahaan besar masuk menggarap lahan pertanian di bumi Merauke.

"Pemerintah akan terus memperhatikan itu. Oleh karenanya pemerintah akan dorong Bulog turun langsung membeli hasil panen petani rakyat. Selain itu, bantuan benih, pupuk, dan alsintan akan terus dijaga. Di Merauke juga akan dibangun pertanian modern dengan *high technology*, yakni pertanian dengan penggunaan mekanisasi penuh dan menuju pertanian organik" papar Mentan.



Antisipasi Dampak El Nino Pada Stok Pangan

Pemerintah Berencana Tingkatkan Anggaran Pertanian

"Efek El Nino berpotensi mengganggu stok pangan dunia. Untuk mengatasinya infrastruktur yang berfungsi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan perlu dibangun. Pemerintah telah menaikkan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan sistem irigasi pertanian. Pembangunan infrastruktur sudah menjadi keharusan untuk diwujudkan agar masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan minimnya pasokan pangan"



Musim kering panjang atau El Nino diprediksikan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang.

Penyimpangan iklim tersebut disebut-sebut dapat mengancam pasar pangan dunia. Seluruh dunia tengah mewaspadaai fenomena alam tersebut termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi fenomena alam tersebut. Pasalnya sebentar lagi Indonesia akan memasuki masa panen raya. Pihaknya takut jika stok pangan nasional akan terganggu dengan adanya fenomena alam tersebut.

"Seluruh dunia tengah mewaspadaai fenomena musim kering panjang atau yang biasa disebut El Nino. Stok pangan dunia termasuk Indonesia, berpotensi terganggu oleh efek El Nino yang diprediksi akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Dampak perubahan musim kering yang panjang menyebabkan semua negara sudah mulai mempersiapkan stok pangan sebanyak-banyaknya," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jakarta (27/5).

Presiden mengungkapkan saat sekarang Cina sudah meningkatkan stok kebutuhan pangannya dalam menghadapi El Nino. Indonesia pun akan melakukan hal yang sama. Apabila selama musim El Nino, Indonesia tidak segera melakukan antisipasi maka inflasi nasional akan tinggi. Oleh sebab itu, Pemerintah telah menaikkan anggaran untuk sektor Pertanian dari Rp 14 triliun pada 2014 menjadi Rp 32 triliun pada 2015. Rencananya, pada 2016 anggaran pertanian juga akan ditingkatkan menjadi Rp 40 - Rp 50 triliun. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan sistem irigasi pertanian.

"Perlu saya sampaikan, anggaran untuk bidang pertanian tahun lalu Rp 14 triliun, tahun ini Rp 32 triliun, tahun depan Rp 40 triliun-Rp 45 triliun. Selalu dinaikkan karena kita ingin infrastruktur bidang pertanian betul-betul kita siapkan. Kenaikan anggaran bidang pertanian dari Rp 32 triliun menjadi sekitar Rp 40 triliun - Rp 45 triliun pada 2016 bertujuan untuk mendorong infrastruktur dan meningkatkan produksi pangan nasional sebagai antisipasi laju inflasi kelompok bahan pangan" ungkap Presiden.

Dalam Rakornas VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden mengatakan dalam beberapa tahun ke depan pemerintah berkonsentrasi untuk membangun infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi agar bisa meningkatkan produksi pangan dan menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan kombinasi antara infrastruktur pertanian yang memadai, benih unggul, pupuk serta alat dan mesin pertanian, produksi pangan nasional akan melimpah. Sehingga Indonesia tidak perlu takut adanya perubahan musim dan el-nino yang menyebabkan kekeringan yang panjang.

"Salah satu infrastruktur yang akan dibangun adalah bendungan. Bendungan ini bisa berfungsi untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Untuk itu konsentrasi kita selalu pada infrastruktur pangan baik, bendungan dan irigasi. Yang jelas ini perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur itu bukan lagi target melainkan sudah menjadi keharusan yang benar-benar diwujudkan agar masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan minimnya pasokan pangan" kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa Pemerintah harus membangun infrastruktur pangan seperti bendungan. Karena Pemerintah ingin menaikkan pangan nasional. Jika stok pangan sudah melimpah, maka Pemerintah tidak perlu khawatir

dengan adanya perubahan iklim dan el nino atau musim kering berkepanjangan.

"Apabila pangan berlimpah maka tidak perlu takut akan El nino. Karena stok dan pasokannya ada. Tetapi, kalau kita hanya limited, stok pangan kita sangat terbatas sekali atau kita malah semakin terus melakukan impor, maka dengan adanya el nino, kita menjadi kuatir semua," tegas Presiden.

Presiden menerangkan saat sekarang semua negara tengah berlomba-lomba meningkatkan pasokan pangan sebagai antisipasi dampak el nino. Kekhawatiran el-nino telah membuat banyak negara membeli produk pangan dalam jumlah besar sebagai stok untuk memastikan ketahanan pangan, salah satunya China atau Tiongkok yang sudah mulai banyak melakukan pembelian komoditas pangan.

Presiden khawatir akan fenomena alam tahunan tersebut, terlebih beberapa pekan lagi Indonesia akan memasuki bulan Ramadan di mana permintaan akan bahan pangan biasanya meningkat. Sementara panen raya padi belum selesai dan stok beras seharusnya masih bisa ditambah. Terlebih harga beberapa bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah sudah mulai merangkak naik. Tiap tahun Indonesia selalu diresahkan dengan gejolak harga cabai. Bahkan, dua tahun lalu harga cabai melejit hingga berlipat-lipat.

"Jika pemerintah daerah bisa menggerakkan masyarakatnya untuk menanam cabai, maka Indonesia tidak akan mengalami keresahan tersebut tiap tahun. Sangat mudah menanam cabai, tapi selalu setiap tahun ada gejolak harga cabai. Kebutuhan cabai padahal tidak banyak. Bahkan dua tahun lalu harga cabai bisa sampai berkali lipat, karena pasokan tidak ada. Hal kecil kalau tidak jeli, akan ber dampak ke inflasi," ujar Presiden.

Pentingnya Peran Profesor Riset dan Ahli Dalam Mencapai Swasembada Pangan

"Profesor riset yang ada di Badan Litbang Pertanian dapat mendukung program swasembada pangan melalui penerapan teknologi dan inovasi. Pentingnya sumbangan pemikiran dan dukungan nyata para ahli dan pentingnya inovasi teknologi yang telah dihasilkan Balitbangtan untuk diaplikasikan dalam program pencapaian swasembada pangan"



Dalam upaya mewujudkan program swasembada pangan di Indonesia dengan skala prioritas padi, jagung, dan kedelai, Menteri Pertanian bermaksud melibatkan para profesor riset di lingkup Kementerian Pertanian terutama di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang memiliki kekayaan sumberdaya manusia berkualitas

profesor turun gunung mensukseskan swasembada" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dalam acara sarasehan III Forum Komunikasi Profesor Riset Kementan, di Bogor (19/5).

Dalam Sarasehan yang dihadiri 121 profesor riset, Menteri Pertanian menerangkan pihak Kementan akan menggerakkan profesor riset yang berada di bawah Badan Penelitian dan

pangan akan lebih mudah tercapai. Setidaknya dari 1.800 peneliti ada sebanyak 121 profesor riset dengan berbagai keahlian" terang Mentan.

Mentan menegaskan pentingnya sumbangan pemikiran dan dukungan nyata para ahli dan pentingnya inovasi teknologi yang telah dihasilkan Balitbangtan untuk diaplikasikan dalam program pencapaian swasembada pangan. Para Profesor Riset diharapkan secara berkala menyampaikan masukan dan pemikiran guna penyempurnaan berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian.



Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa anggota Forum Komunikasi Profesor Riset yang aktif dan peneliti di Balitbangtan yang saat sekarang jumlahnya lebih dari 1000 peneliti akan dibagi dalam kelompok-kelompok dengan tugasnya terkait kebijakan, menggerakkan, dan memfasilitasi dalam kelompok-kelompok, serta penugasan lain yang akan dieksploitasi oleh Mentan.

Untuk itu Mentan telah berkenan menandatangani Surat Keputusan tentang Penugasan seluruh Profesor Riset agar dapat terlibat langsung dalam program Upaya Khusus (UPSUS) tujuh komoditas strategis. Surat penugasan tersebut menunjukkan bagaimana Mentan secara langsung menggerakkan Profesor Riset dan Peneliti Balitbangtan untuk terlibat aktif mendukung swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas komoditas strategis.

husus di bidang riset sehingga sudah tidak diragukan lagi untuk berperan nyata dalam mewujudkan swasembada pangan. Para profesor tersebut meliputi ahli di bidang tanaman jagung, padi, dan kedelai.

"Tahun ini kita fokus untuk mewujudkan swasembada pangan kedaulatan pangan khususnya padi, kedelai dan jagung. Ini menjadi skala prioritas yang memerlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk pakar sesuai ahlinya, harus diikuti semua, untuk itu saya mengajak profesor riset yang ada di Badan Litbang Pertanian untuk mendukung program swasembada pangan melalui penerapan teknologi dan inovasi, sudah saatnya para

Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) untuk ikut mengawal program upaya khusus (upsus) swasembada pangan. Kementan menggandeng 1800 peneliti untuk wujudkan kedaulatan pangan. Peneliti tersebut akan fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai.

"Sebagai upaya mempercepat capaian swasembada pangan berbagai upaya khusus dilakukan agar program swasembada pangan yang ditargetkan dapat terwujud dalam waktu tiga tahun. Untuk mengawal Upsus kami akan melibatkan pakar yang ada di Badan Litbang Pertanian, Dengan pengawalan peneliti dan profesor diharapkan pencapaian swasembada

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Haryono menerangkan ada 10 UPSUS, dimana Balitbangtan diminta mengawal yaitu 1) padi; 2) jagung; 3) kedelai; 4) daging; 5) tebu; 6) bawang merah; 7) cabai; 8) UPSUS kawasan pangan Merauke; 9) Mekanisasi pertanian untuk dapat menggerakkan 1) sd 7) dan ke 10

adalah UPSUS dalam rangka integrasi Taman Sains Pertanian (TSP) dan Taman Teknologi Pertanian (TTP) ke dalam sistem agribisnis.

"Pihak Balitbangtan akan menggerakkan peneliti untuk mengawal Upsus swasembada pangan dimana ada sekitar 121 profesor riset dan 1.800 penelitian yang memiliki keilmuan dan pengalaman di lapangan. Kami memiliki lebih dari 100 profesor riset yang mempunyai keahlian masing-masing, baik di bidang pangan, kebun, hortikultura dan peternakan untuk mendukung swasembada pangan agar sustainable," terang Kepala Balitbangtan.

Terkait acara sarasehan III FKPR, Kepala Balitbangtan mengatakan, pertemuan para profesor riset Balitbang Pertanian

dalam rangka menindaklanjuti program pemerintah untuk mewujudkan swasembada melalui penerapan teknologi dan inovasi karena keberhasilan pertanian tidak terlepas dari peran serta teknologi dan inovasi. Keterlibatan para peneliti dan profesor riset Balitbang untuk turun ke lapangan, memberikan pendampingan, mengontrol kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyediaan air, budidaya, panen hingga pascapanen.

"Karena keberhasilan pertanian berdasarkan penggunaan teknologi dan inovasi maka pakar dan peneliti Balitbang Pertanian telah menghasilkan teknologi dan inovasi yang dapat digunakan di lapangan untuk mewujudkan program swasembada. Balitbang Pertanian akan menggerakkan seluruh peneliti dan profesor yang memiliki

keahlian dibidangnya seperti hortikultura, perkebunan dan peternakan, untuk berkerja bersama-sama pemerintah mewujudkan swasembada," kata Kepala Balitbangtan.

Menurut Kepala Balitbangtan dari sisi teknologi, khususnya varietas unggul padi, sudah sangat siap, baik dari stok benih dan bibit. Bahkan Balitbangtan telah membangun Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) di tiap-tiap propinsi. Sebelumnya benih sumber hanya ada di Balai Besar (BB) Padi. UPBS tersebut nantinya membangun jaringan dengan penangkar benih di daerah. Benih-benih tersebut bisa dimanfaatkan langsung petani, bahkan juga industri benih nasional yakni PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri (SHS).

Kementan Dorong 100 Kabupaten Di Indonesia Untuk Tingkatkan Produksi Jagung Nasional

"Kementan berfokus memetakan wilayah-wilayah memiliki keunggulan hasil pertanian komoditas jagung, maka terdapat sebanyak 101 Kabupaten seluruh Indonesia yang disinyalir memiliki komoditas jagung yang unggul. Upaya pencapaian swasembada jagung perlu partisipasi aktif dan dukungan Bupati. Bupati harus berperan aktif dalam mencapai swasembada pangan, termasuk ikut memacu kenaikan produksi jagung"



Pemerintah RI tetap bertekad meningkatkan produksi jagung agar dapat tercipta swasembada jagung di dalam negeri. Kementerian Pertanian pun terus melakukan berbagai kebijakan dan inovasi di bidang pertanian, khususnya di tiga komoditi yang menjadi prioritas utama, yakni padi, jagung dan kedelai. Dalam menentukan kebijakan peningkatan produksi jagung, Kementerian Pertanian menggelar dialog Menteri Pertanian dengan 100 bupati se-Indonesia, karena Menteri Pertanian menilai swasembada jagung bisa terwujud bila semua pemangku kepentingan memiliki semangat mendorong produktivitas. Dialog yang digelar Kementerian Pertanian diharapkan membuka berbagai cara dan solusi agar produksi jagung Indonesia meningkat.

"Prioritas Kementerian Pertanian pada tahun ini yaitu meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai. Upaya pencapaian swasembada jagung perlu partisipasi aktif dan dukungan Bupati. Bupati harus

berperan aktif dalam mencapai swasembada pangan, termasuk ikut memacu kenaikan produksi jagung. Karena Bupati menentukan laju pembangunan di daerah, maka saya minta Bupati dapat menaikkan sekitar 10--20 persen lahan baru agar mencapai 1.000 hektare lahan baru. Ke depannya kalau bisa kita sharing dengan Bupati-Bupati apa yang kurang akan kita tambah" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai acara Dialog Upaya Pencapaian Swasembada Jagung di Kampus Kementan (4/5).

Mentan menerangkan jagung merupakan satu komoditi utama selain padi dan kedelai yang ditargetkan produksinya meningkat guna mencapai kedaulatan pangan. Jagung juga sebagai salah satu komoditas strategis bagi Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan. Jagung merupakan sumber bahan baku pakan ternak unggas, sedangkan unggas yang terdiri dari daging ayam serta telur menyumbang lebih dari 50 persen sumber protein masyarakat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu kebijakan yang tepat agar kualitas tanam

jagung dapat mendorong produksi jagung nasional. Apalagi saat sekarang Indonesia masih mengimpor sekitar 3,5 juta ton jagung dari total kebutuhan kurang lebih 20 juta ton per tahun. Untuk itu Mentan bertekad untuk menekan impor hingga Indonesia bisa swasembada jagung.

"Untuk mencukupi kebutuhan jagung dalam negeri, tahun 2015 pemerintah menetapkan sasaran produksi sebesar 20,313 juta ton atau naik sekitar 5% dibanding produksi tahun 2014. Guna memastikan dicapainya swasembada atau diperoleh surplus, pada tahun 2015 pemerintah mencanangkan pertambahan tanam jagung seluas 1 juta hektar, serta tambahan bantuan alat dan mesin pertanian antara lain pemipil jagung 2.132 unit, pengering jagung vertikal 209 unit, combine harvester 15 unit, flat bed dryer 35 unit, serta kerja sama dengan TNI, Kehutanan dan Perhutani. Bantuan tersebut merupakan tambahan kegiatan bersumber dari APBN 2015 di luar kegiatan reguler yang telah ada, yaitu GPPTT jagung seluas 102 ribu hektare dan bantuan benih jagung bersubsidi seluas 100 ribu hektare." terang Mentan.

Mentan mengungkapkan Pihak Kementan juga melakukan kluster terhadap daerah-daerah berpotensi hasil pertanian, komoditas jagung. Kluster itu guna tercapainya swasembada jagung di dalam negeri. Kementan pun terus melakukan upsus dengan memperhatikan keunggulan komparatif suatu wilayah yang mempunyai keunggulan kompetitif. Kementan berfokus memetakan wilayah-wilayah memiliki keunggulan hasil pertanian komoditas jagung. Telah terdata sebanyak 101 Kabupaten seluruh Indonesia yang disinyalir memiliki komoditas jagung yang unggul.

"Dari data itu kami dapat melihat wilayah yang berpotensi lewat komposisi pewilayahan komoditas. Penanaman komoditi memang harus sesuai dengan keunggulan komparatif wilayah tersebut. Jadi jangan asal tanam jagung di 500 kabupaten lebih seluruh Indonesia. Kita juga harus fokus ke wilayah masing-masing, karena sampai saat ini para petani masih kerap memilih komoditas yang menjadi andalan untuk dijual dan itu berkaitan erat budaya masyarakat setempat. Karena berhubungan dengan budaya masyarakat daerah yang terbiasa menanam jagung. Bila daerah yang tidak

bisa tanam kedelai diberikan benih kedelai maka yang ada nanti sia-sia" ungkap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa pendataan 101 kabupaten tersebut untuk mengetahui ciri khas masing-masing daerah dalam mengembangkan tanaman jagung. Dengan begitu alokasi dana pendukung swasembada pangan juga akan disalurkan dengan skema perwilayahan sesuai dengan produk unggulan masing-masing wilayah. Kepada para Bupati agar dapat melakukan optimalisasi lahan peningkatan produksi jagung di wilayah masing-masing.

"Kementan akan memfokuskan produksi jagung di Indonesia ke beberapa wilayah yang selama ini memiliki produksi jagung yang cukup tinggi. Kami akan melakukan aturan zona untuk komoditas, jadi kita pilih nanti mana yang menjadi wilayah sentra produksi jagung, jadi tidak semua wilayah Indonesia. Dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan 101 kabupaten yang telah ditandatangani maka para Bupati hanya menyiapkan lahannya dan kita akan salurkan bantuannya" jelas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring mengatakan persoalan jagung merupakan salah satu persoalan yang rumit, karena pemasarannya hanya terpusat di Jawa dan Sumatera. Padahal Pemerintah mengharapkan, tidak hanya produksi, pemasaran hasil tanaman jagung pun harus menyebar dari Sabang sampai Merauke. Saat sekarang, pemerintah belum mengatur tata niaga jagung sehingga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.

"Karena pemasarannya hanya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, akibatnya, terjadi disparitas harga antar daerah yang cukup signifikan. Sedangkan laju pertumbuhan produksi hanya rata-rata 5% pertahun, sementara permintaan dalam negeri 12%, sehingga meskipun Indonesia produsen jagung, namun masih impor jagung. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor jagung Februari 2015 tercatat mencapai 300.986 ton atau US\$ 71,3 juta" ujar Dirjen Tanaman Pangan.

Walau Belum Swasembada Pangan Kementan Pastikan Stok Beras Aman

"Dengan anggaran pertanian yang sangat besar untuk mendukung kemajuan sektor pertanian di Indonesia maka ketercapaian swasembada pangan merupakan suatu keharusan. Saat sekarang stok beras yang tersimpan di Bulog mencapai 1,3 juta ton, stok beras yang ada masih dinilai dalam kondisi yang aman sehingga pemerintah belum memikirkan impor beras untuk memenuhi kebutuhan"



Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bagi pihak Kementerian Pertanian ketercapaian swasembada pangan merupakan suatu keharusan, apalagi dengan anggaran pertanian yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk mendukung kemajuan sektor pertanian di Indonesia, dan mensejahterakan para petani. Tetapi masalah irigasi, alat dan mesin pertanian, ketersediaan benih, distribusi pupuk serta keberadaan penyuluh masih menjadi persoalan yang sedang

dihadapi Kementerian Pertanian.

"Dalam mencapai swasembada pangan masih terdapat beberapa persoalan yang kita hadapi itu seperti irigasi, alsintan, kurangnya alat-alat pengolahan, pupuk, dan tenaga penyuluh yang belum memadai jumlahnya, padahal ketercapaian swasembada merupakan suatu keharusan" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai acara pertemuan Sarasehan Forum Komunikasi Profesor Riset di Cimanggu, (19/5).

Menurut Mentan, dalam pencapaian

swasembada pangan berbagai program akan dijalankan seperti program mekanisasi untuk mengakselerasi produktivitas hasil pangan. Selain itu ada program lainnya di Kementerian Pertanian, di antaranya adalah "Food Estate" di wilayah Timur Indonesia yang sedang mulai disusun "grand design" serta DED, dan program lainnya. Tetapi Mentan masih bersikap kritis tentang data pertanian di BPS yang belum sinkron.

"Mengetahui food estate atau kawasan

pangan di Merauke, Papua, saya akui bahwa sampai saat ini memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pengelolaan lahan pertanian untuk jenis tanaman padi, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta. Di Merauke lahan seluas 750 ribu hektar akan dikelola oleh BUMN, 250 ribu hektar diantaranya akan dikelola oleh pihak swasta. Barangkali untuk otonomi khusus pangan di Merauke nanti perlu kita atur secara khusus," tutur Mentan.

Saat ditanya tentang beras, Mentan mengungkapkan bahwa saat sekarang stok beras yang tersimpan di Bulog mencapai 1,3 juta ton. Selain itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan terus fokus memantau kegiatan menanam padi dan diyakini panen dari kegiatan menanam itu mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri.

"Stok beras yang ada saat ini masih dinilai dalam kondisi yang aman sehingga pemerintah belum memikirkan impor beras untuk memenuhi kebutuhan. Impor beras itu merupakan alternatif terakhir apabila

seluruh usaha dan upaya yang telah dilakukan masih belum memenuhi kebutuhan dalam negeri" ungkap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menegaskan bahwa posisi ketersediaan beras di dalam negeri saat sekarang cukup aman. Hal tersebut dibuktikan dengan stok beras Bulog sebesar 1,7 juta ton. Bahkan, di daerah-daerah masih ada stok gabah. Sementara terkait dengan harga beras yang cukup tinggi, Mentan mengatakan pada beberapa wilayah harga gabah masih berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), seperti di Sabang sampai Merauke harga beras mencapai Rp 6.700 per kg. Untuk itu perlu dilakukan perubahan strategi dalam pengadaan beras.

"Misalnya harga beras di Merauke, Papua, Rp 6700 per kilogram. maka Bulog harus lakukan serapan maksimal. Dari pihak Kementerian Perdagangan berkali-kali sudah menjelaskan bahwa tindakan impor beras merupakan alternatif terakhir. Keputusan untuk melakukan impor beras itu setelah dilakukan evaluasi dari tingkat

penyerapan Bulog pada akhir Mei dan awal Juni 2015, karena saat ini masih merupakan masa panen dan Bulog masih memiliki stok beras hingga empat bulan mendatang" tegas Mentan.

Mentan juga mengungkapkan selama ini strategi yang diterapkan oleh pemerintah yaitu Bulog hadir di penggilingan sehingga pedagang yang mendapat untung lebih besar antara 50 hingga 100 persen. Sedangkan petani hanya mendapat untung 10 sampai 20 persen. Strategi inilah yang harus diubah, dimana Bulog harus hadir di tengah petani, agar petani yang mendapatkan keuntungan lebih besar dan petani dapat merasakan kehadiran Bulog.

Dalam kesempatan tersebut Mentan meminta Bulog untuk kreatif dalam menghadapi regulasi terkait kadar air dengan menggunakan alat pengering, sehingga beras dari petani dapat diserap dengan harga yang lebih menyejahterakan petani. Cara seperti itu perlu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus dapat memajukan sektor pertanian Indonesia.

Komitmen Kerja Sama Spesifik Di Bidang Pertanian

"Pertemuan Mentan dengan 4 Dubes hasilkan komitmen bersama dengan prioritas kerja sama yang spesifik masing-masing negara yaitu Kanada pada bantuan Tenaga Ahli mendukung pengembangan Produk Persusuan di Indonesia. Kerja sama Indonesia-Turki dalam penguatan pasar untuk akses produk pertanian di kedua negara. Kuba dengan "Joint Efforts" untuk pengembangan industri gula dalam bentuk penelitian bersama. Indonesia meningkatkan bantuan pembangunan sektor pertanian di Fiji dalam bentuk bantuan traktor dan peningkatan kapasitas"



Dalam rangka mendukung pembangunan sektor pertanian, Kementerian Pertanian merasa perlu memperkuat kerja sama bilateral. Oleh karena Kementerian Pertanian menggandeng beberapa negara belahan Uni Eropa dan Amerika untuk memperkuat sektor pertanian, hal itu ditandai dengan adanya pertemuan antara Menteri Pertanian

dengan empat duta besar Turki, Fiji, Kuba, dan Kanada.

"Pertemuan tersebut melahirkan komitmen bersama antara Indonesia dengan setiap negara mitra untuk memperkuat kerja sama, dengan prioritas kerja sama yang spesifik masing-masing negara dalam rangka mendukung pembangunan sektor pertanian," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai menerima 4 Dubes di Kanpus

Kementan (26/5).

Kepada Pers, Mentan memaparkan hasil pertemuannya yaitu prioritas kerja sama bilateral dengan Kanada akan fokus pada bantuan Tenaga Ahli dalam rangka mendukung pengembangan Produk Persusuan (*dairy products*) di Indonesia. Dalam hal itu, Duta Besar Kanada telah menyampaikan komitmen negaranya untuk berinvestasi pada sektor *dairy products* di Indonesia, termasuk di dalamnya

dukungan untuk penyediaan *Cattle Breeding*.

"Indonesia dan Kanada akan fokus kerja sama bantuan tenaga ahli guna mendukung pengembangan produk susu di Indonesia. Dubes Kanada juga menyampaikan komitmen bantuan Tenaga Ahli untuk penguatan *Project Management* di Indonesia. Secara umum, Dubes Kanada juga menyampaikan komitmen mendukung pengembangan *Food Estate*, termasuk di dalamnya *Rice Estate*, pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di daerah perbatasan," papar Mentan.

Dari hasil pertemuan dengan Dubes Turki, Mentan menerangkan adanya komitmen kerja sama Indonesia - Turki dalam penguatan pasar untuk akses produk pertanian di kedua negara. Kerja sama itu khususnya untuk komoditas kelapa sawit asal Indonesia dan gandum asal Turki, melalui pembentukan pasar bebas bersama, dalam bentuk Indonesia - Turkey Free Trade Areas (IT-FTA).

"Untuk implementasinya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Selain itu, Dubes Turki juga menyampaikan komitmen negaranya untuk mendorong investasi pada sektor Live Cattle di Indonesia, serta sektor-sektor lainnya seperti benih, pupuk, gandum, dan produk-produk turunan dari peternakan" terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Dubes dari Turki dan Kanada menyatakan kesiapan negaranya untuk berinvestasi perternakan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan terutama daging. Beberapa wilayah yang diprioritaskan untuk investasi antara lain Pulau Buru, Maluku, Nusatenggara Timur dan Barat. Namun Mentan belum menyebutkan bentuk investasi yang akan dilakukan serta nilai yang ditanam Turki dan Kanada di Indonesia.

"Dengan tumbuhnya investasi, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Dari pihak Turki dan Kanada telah menyatakan siap untuk berinvestasi perternakan di Indonesia. Kesiapan investasi ini akan ditandai penandatanganan memorandum of understanding (MoU). Kita sedang dalam penajajaran, Insya Allah bulan ini akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman," jelas Mentan.

Adapun hasil pertemuan dengan Dubes Kuba, Mentan mengungkapkan fokus pembahasan terkait dengan "*Joint Efforts*" untuk pengembangan industri gula dalam bentuk penelitian bersama. Dalam hal pembahasannya, Mentan sharing dengan Dubes Kuba terkait pengalaman Kuba dalam pengembangan industri gula sehingga Kuba saat sekarang menjadi negara pengekspor gula terbesar. Sementara itu pembahasan dengan Duta Besar Kuba mengenai transfer teknologi

pengolahan tebu.

"Dubes Kuba menyampaikan undangan dari Menteri Pertanian Kuba kepada saya untuk dapat berkunjung ke Kuba dalam rangka menjajaki berbagai peluang kerja sama bidang pertanian, khususnya sektor industri gula. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengalaman Kuba dalam pengembangan industri gula sehingga Kuba saat ini menjadi negara pengekspor gula terbesar," ungkap Mentan.

Mentan juga menambahkan dari hasil pertemuan dengan Dubes Fiji menghasilkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan bantuan bagi pembangunan sektor pertanian di Fiji dalam bentuk bantuan traktor dan bantuan peningkatan kapasitas. Dalam pertemuan itu Indonesia akan menyumbangkan 20 alat pertanian kepada Fiji.

"Kementerian Pertanian akan memberi bantuan sebanyak 20 traktor pada Fiji, sebuah negara kepulauan yang terletak di sebelah selatan Samudera Pasifik. Fiji merupakan negara kepulauan kecil dengan luas total lebih dari 18 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya sekitar 900 ribu jiwa. Biasanya kita memberikan 10 alat pertanian setiap tahun kepada Fiji, tahun ini kita akan berikan 20 alat," ujar Mentan.

Mentan : "Bantu Tingkatkan Produksi Pangan Mahasiswa Agar Turun Ke Sawah"

"Agar tidak menjadi pengimpor pangan dan tidak mewariskan impor pangan pada generasi di masa yang datang, mahasiswa agar bergerak turun ke sawah, membantu meningkatkan produksi pangan petani. Mahasiswa pertanian dapat berperan serta menjadi penyuluh pertanian yang baik bagi petani, dan giat mengembangkan serta mencari varietas baru"



Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan Nasional, dibutuhkan peran penyuluh pertanian. Untuk menutupi jumlah

penyuluh pertanian di lapangan yang masih minim, Kementerian Pertanian berencana akan melibatkan mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, juga melibatkan anggota Kontak Tani dan Nelayan

Andalan (KTNA).

"Saya tantang para mahasiswa dan dosen agar bergerak turun ke sawah, membantu meningkatkan produksi pangan petani, sehingga kita tidak menjadi pengimpor pangan

dan kita tidak mewariskan impor pangan pada generasi kita di masa yang datang" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat meninjau kebun penelitian Fakultas Pertanian Universitas

Hasanudin (Unhas) di Makassar (28/5).

Kebun penelitian tersebut merupakan lahan praktek mahasiswa yang konsentrasi dalam bidang ilmu pemuliaan tanaman. Sedangkan kegiatan yang dilakukan mahasiswa yakni melakukan demonstrasi plot (demplot) persilangan jagung, cabe, padi, dan tanaman pertanian lainnya sehingga menghasilkan benih unggul untuk dikembangkan petani.

Mentan mengapresiasi kegiatan penelitian Unhas khusus Fakultas Pertanian bersama mahasiswanya dan Mentan menilai Unhas bersama mahasiswanya mempunyai kemampuan besar memperbaiki pertanian. Melihat potensi dan keseriusan pihak Unhas tersebut, Mentan memberikan bantuan berupa 5 unit hand traktor, benih unggul untuk tanaman jagung, cabe, padi, dan pembangunan irigasi tetes.

"Kebun penelitian ini harus dikembangkan menjadi Pusat Penelitian Tanaman Pertanian, seperti padi, jagung, cabe, dan tanaman pertaniannya untuk menyuplai dan memperkuat pangan Indonesia Timur. Sebab, komoditi pertanian tersebut yang menjadi permasalahan bangsa kita selama ini, yakni selalu menjadi komoditi Impor setiap tahunnya" ujar Mentan.

Dalam kesempatan itu, Mentan memberikan motivasi kepada mahasiswa pertanian untuk berperan serta menjadi penyuluh pertanian yang baik bagi petani, dan giat mengembangkan serta mencari varietas baru seperti beras organik. Pemerintah sedang mengembangkan beras organik untuk membantu konsumsi di Merauke dan memenuhi pasar Eropa serta Amerika, karena permintaan dari dua negara itu sangat tinggi.

"Pentingnya mengembangkan beras organik itu di samping

upaya mewujudkan swasembada pangan, karena beras organik baik untuk kesehatan dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan beras anorganik. Beras organik ini untuk menopang pangan Merauke sebanyak 1 juta ton, Sasaran jangka panjangnya ekspor ke Eropa dan Amerika," himbau Mentan.

Lebih lanjut Mentan memaparkan bahwa selama tiga tahun

8.500 orang dan anggota kontak tani nasional Indonesia (KTNA) 39 ribu orang.

Mensikapi 4 kebijakan strategis itu, Rektor Unhas Dwiah Aries Tina menyatakan akan mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan dan juga ketahanan pangan nasional. Selain itu Unhas telah menyediakan lahan pertanian sebesar 14 ha untuk dijadikan

mahasiswa 200 ha yang akan di-launching tanggal 4 Juli 2015, ini sudah digaung-gaungkan. Kami akan bekerja sama dengan berbagai universitas untuk sama-sama mendukung pencapaian swasembada pangan," kata Rektor Unhas.

Terkait himbauan Mentan untuk keterlibatan mahasiswa dalam pertanian, Rektor Unhas berencana akan mencanangkan satu mahasiswa untuk 200



ke depan akan fokus pada peningkatan produksi untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2017. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Pertanian telah membuat kebijakan strategis, yakni pertama, perbaikan jaringan irigasi, dimana sebesar 52 persen atau 3 juta ha jaringan irigasi tersier yang rusak. Kedua, merubah aturan pengadaan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) yang sebelumnya melalui mekanisme tender, kemudian dirubah ke penunjukan langsung (PL).

Yang ketiga, penambahan jumlah alsintan sebesar 60 ribu unit di tahun 2015 dan saat ini sudah tersebar seluruh Indonesia sebanyak 30 ribu unit. Kemudian keempat, penambahan jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sebelumnya hanya tersedia 27 ribu orang, namun saat ini sudah sebesar 70 ribu orang dengan melibatkan TNI yakni Babinsa, mahasiswa bersama dosen sebanyak



kebudayaan, yang akan menghasilkan bibit unggul komoditi pertanian.

"Kami membuka tangan mendukung ketahanan pangan dan menciptakan daya saing produk pertanian sehingga dapat bersaing di tingkat dunia. Langkah nyata yang dilakukan Unhas, yaitu dengan membuat program satu

hektare yang bertujuan bersama-sama mendukung program-program pemerintah, termasuk mengembangkan kebun percontohan. Saat sekarang Unhas telah memiliki 11 hektare kebun percontohan ditambah tiga hektare di luar area kampus yakni di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulsel.

Mentan: "Harga Beras Rendah Dari HPP Bukti Stok Beras Melimpah"

"Harga beras yang beredar khususnya di Pasar Cibinong masih berada di bawah HPP. Rendahnya harga beras merupakan bukti bahwa produksi beras sedang melimpah. Melimpahnya beras karena pada bulan Mei ada panen padi seluas 800.000 hektar. Kemudian pada bulan Juni 2015 akan panen 1,39 juta hektar"



Sebagai upaya menstabilkan harga beras, dalam beberapa hari terakhir pemerintah mulai menggodok wacana untuk impor beras tetapi pihak Kementerian Pertanian tetap memastikan bahwa stok beras menghadapi bulan puasa dan lebaran aman. Untuk memantau pasokan dan harga beras di daerah Jabodetabek khususnya di Kabupaten Bogor, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Cibinong, Bogor (20/5).

Dari hasil berdialog dengan pedagang beras di Pasar Cibinong, Mentan mengetahui bahwa sampai saat sekarang tidak ada beras impor dan memastikan pasokannya cukup atau aman. Karena, suplai dari sentral beras di daerah tergolong melimpah. Hal itu disebabkan musim panen raya dari bulan Januari hingga April dengan produksi yang tinggi dari tahun sebelumnya. Namun, harga beras di pasar berada di kisaran Rp 6.500 hingga Rp 7.200 per kg.

"Sidak tersebut bertujuan untuk memastikan pasokan beras dan harga beras di pasar apakah sudah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau justru di bawah HPP. Ternyata harga beras yang beredar khususnya di Pasar Cibinong masih berada di bawah HPP. Seharusnya, harga beras yang dijual di pasar berada pada kisaran Rp 7.300 hingga Rp 8.500. Sebagaimana diatur dalam Inpres No. 5 Tahun 2015, harga untuk beras yakni Rp 7.300 per kg" kata Mentan.

Mentan menerangkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015, HPP di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 7.300 per kilogram. Artinya, bila harga beras di pasar saja Rp 7.200 per kilogram, harga di petani sudah pasti jauh di bawah HPP. Dengan harga beras tersebut yang lebih rendah dari HPP menunjukkan bahwa produksi beras sedang melimpah pada saat sekarang.

"Di petani kemungkinan hanya Rp 6.700 per kilogram, di Pasar Cibinong saja di bawah HPP, HPP Rp 7.300 per kilogram, artinya



produksi beras meningkat, Harga di pasar saja bisa berada di bawah harga pembelian pemerintah sebesar Rp. 7.300/kg. Harga di petani bisa lebih rendah dari pada itu. Rendahnya harga beras ini merupakan bukti bahwa produksi beras sedang melimpah" terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa melimpahnya beras karena pada bulan Mei ada panen padi seluas 800.000 hektar. Kemudian pada bulan Juni 2015 akan panen 1,39 juta hektar. Dengan kondisi demikian maka menjelang bulan puasa stok beras aman dan harganya juga terkendali. Stok beras cukup untuk bulan Ramadhan, bahkan diperkirakan sampai lebaran.

"Harga beras saat ini stabil dan cenderung turun. Harga beras jenis medium sebesar Rp 7.200/kilogram, atau dibawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 7.300/kilogram. Artinya harga di bawah HPP. Bisa dikatakan produksi beras meningkat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelas Mentan.

Mentan mengungkapkan, pihaknya dalam memantau harga beras sudah keliling dari Sabang sampai Marauke. Ada 75 kabupaten yang harga gabah di bawah HPP. Oleh karena itu, Bulog diharapkan segera

menyerap beras petani sebanyak-banyaknya dengan harga sesuai HPP. Hal itu perlu dilakukan agar petani tak mengalami kerugian. Bila petani rugi, motivasi mereka menanam padi lagi akan berkurang.

"Kami minta Bulog dapat menyerap sebanyak-banyaknya karena di pasar saja Rp 7.200 per kilogram. Lantas bagaimana di petani? Sekarang harga gabah tiga minggu lalu Rp 3.200/kilogram hingga Rp 3.600/kilogram di lapangan. Bahkan di Marauke harga beras Rp 6.500/kilogram," ungkap Mentan.

Terkait wacana pemerintah untuk impor beras, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan kembali bahwa pemerintah belum memutuskan membuka impor beras untuk stok Bulog. Pasalnya, pasokan beras dari dalam negeri masih melimpah dan Bulog diharapkan bisa menyerap sebanyak mungkin.

"Impor adalah pilihan terakhir. Keputusan impor sampai sekarang belum ada. Kita masih menunggu lagi panen Juli, dengan memastikan kondisi beras di pasar, maka baik pihak Kementan maupun Kemendag menegaskan bahwa pasokan beras sampai Lebaran masih aman, sehingga tidak perlu impor beras" kata Mendag.

Komoditas Unggulan Daerah dan Antisipasi El Nino

"Kementan telah memprogramkan fokus pada pengembangan komoditas unggulan pertanian yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia dan Kementan akan mengantisipasi ancaman El Nino yang diperkirakan akan melanda sebagian besar Indonesia dan berdampak pada sektor pertanian"



Kementerian Pertanian pada tahun 2015 akan memfokuskan upaya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah di seluruh Indonesia. Pengembangannya tidak lagi disebar merata tapi hanya fokus pada daerah-daerah tertentu sehingga lebih optimal. Pengembangan komoditas unggulan tersebut sudah diatur berdasarkan keunggulan daerah masing-masing, sehingga setiap daerah bisa fokus mengembangkan komoditi unggulannya dari penanaman hingga panen.

"Untuk mempermudah pemerintah dalam mengetahui pasokan, distribusi, bahkan stok. Tahun ini Kementan telah memprogramkan fokus pada pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan daging sapi yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, Misalnya untuk Pengembangan bawang merah dan cabai di Kabupaten Minahasa, Sulut, jagung di Bima, dan kedelai di Aceh" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat kunjungan kerja di Manado, (28/5).

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa produksi beras dan komoditas lainnya aman dalam menghadapi berbagai kegiatan besar seperti Hari Raya karena Pemerintah menjamin persediaan beras di Indonesia cukup aman dalam beberapa bulan ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Stok beras saat sekarang aman. Produksi beras Januari-April 2015 tercatat sebanyak 20 juta ton sehingga cukup untuk enam hingga tujuh bulan ke depan.

"Saat ini stok beras di Tanah Air cukup aman, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, persediaan beras maupun gabah kering panen di Indonesia diperkirakan cukup aman, mengingat hasil produksi petani lokal sudah mencukupi hingga bulan September 2015 dengan begitu stok beras kita cukup

untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran 2015, ketersediaan beras itu akan mampu memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia" terang Mentan.

Menurut Mentan, selain upaya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah. Pihak Kementan akan mengantisipasi ancaman El Nino yang diperkirakan akan melanda sebagian besar Indonesia dan berdampak pada sektor pertanian. Pasalnya, ada sekitar 200.000 hektare daerah di Indonesia yang selalu langganan kekeringan, sedangkan yang puso sekitar 28.000 hektar. Jika telah diantisipasi dari awal, diharapkan musim kering tahun 2015 tidak akan terlalu berpengaruh terhadap produksi padi secara nasional. Namun, Mentan tetap menghimbau agar permasalahan el nino jangan dianggap enteng.

"Biasanya lahan yang mengalami kekeringan di Indonesia seluas 200 ribu hektare, sehingga Kementan telah mempelajarinya selama 5 hingga 10 tahun dan telah menyiapkan langkah-langkah antisipasinya yang sudah dipikirkan. Walaupun perkiraan El Nino di Indonesia lemah, namun tetap jauh-jauh hari harus diantisipasi dengan membentuk tim yang saat ini sudah mulai berjalan. Saya telah mengumpulkan semua pakar pertanian dan yang berkompeten mengatasi permasalahan El Nino tersebut, kita jangan menganggap remeh dengan hal ini," ujar Mentan.

Terhadap kemungkinan terjadinya kekeringan, Mentan merasa perlu sebuah tim khusus yang dibentuk untuk menanganinya. Untuk itu,



pihak Kementerian Pertanian membentuk tim khusus untuk menghadapi ancaman el nino.

"Dalam mencegah El Nino, saya telah membentuk tim khusus dan tim ini sudah mapping. Saya minta tim dan pakar bekerja agar jangan anggap ringan masalah ini. Kepada kepala dinas bila terjadi kekeringan agar segera melaporkan sehingga kami bisa langsung kirim pompa" ujar Mentan.

Menanggapi himbuan Mentan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut Yohanis Panelewen mengatakan, pihaknya juga mengimbau ke kabupaten dan kota dan pihak lainnya bisa saling membantu menyosialisasikan hal ini pada petani, sehingga mampu meminimalkan terjadi gagal panen karena kekeringan.

Terkait pengembangan komoditas unggulan, Kadistanak-Sulut menerangkan bahwa petani di Sulut akan memilih menanam komoditas yang cocok sesuai musim pun merupakan solusi terbaik. Namun, secara keseluruhan cara tanam petani di Sulut memang ada puncak panennya namun setiap saat ada saja petani yang panen.





Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
BIRO UMUM DAN HUMAS
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax. (021) 780 4457

humas@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id